



BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp9,2 T

JAKARTA - Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara harus terus ditingkatkan. Ini terkait dengan terusnya temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2013 menyebut, BPK menemukan 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. "Dari jumlah tersebut, 3.452 kasus senilai Rp9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan," ujarnya saat membacakan laporan IHPS II-2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin.

Jika dicermati, jumlah dan nilai temuan tersebut lebih sedikit dibanding temuan IHPS I-2013. Data BPK menunjuk-

kan, dalam IHPS I-2013 yang disampaikan kepada DPR dan DPD pada Oktober 2013 lalu, BPK menemukan 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara.

Menurut Hadi, sepanjang Semester II-2013 lalu, BPK memeriksa 662 objek pemeriksaan dengan prioritas pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sebanyak 117 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT. "Pemeriksaan dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara," sebutnya. (owi)